



LAPORAN TAHUNAN

2019
EDITION

SAMBUTAN

KETUA KOMITE KONSULTATIF



Bapak dan Ibu Anggota Komite Konsultatif, Komite Kerja, Kelompok Kerja KSAP, serta para pengguna Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, KSAP merupakan lembaga independen nonstruktural yang bertugas menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah. Sebagai organisasi yang beranggotakan para profesional dibidang akuntansi pemerintahan, KSAP diharapkan dapat menghasilkan produk standar akuntansi pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan para penyusun dan pengguna laporan keuangan Pemerintah.

Untuk menjamin independensinya, KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden. Komite bekerja berdasarkan proses baku penyusunan standar (*due process*). Sebelum ditetapkan sebagai suatu standar, *draft* standar dimintakan pendapat publik (*limited/public hearing*) untuk memperoleh tanggapan dan masukan, untuk selanjutnya dimintakan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyusunan standar akuntansi yang dilakukan KSAP saat ini masih belum maksimal jika dibandingkan dengan standar akuntansi sektor publik internasional. Karena itu saat ini KSAP sedang berusaha untuk menyusun standar akuntansi baru agar sejalan dengan praktik akuntansi internasional. Penyusunan standar baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Akhirnya, kepada seluruh anggota Komite Konsultatif, Komite Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat KSAP, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga KSAP dapat berkontribusi secara lebih baik di masa yang akan datang. Untuk seluruh *stakeholder* standar akuntansi pemerintahan, kami ucapkan terima kasih atas dukungannya kepada KSAP selama ini. Kami berharap peran serta dari berbagai pihak, baik dalam bentuk tanggapan maupun saran, dapat terus kami terima untuk penyempurnaan penyusunan standar di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2020
Ketua Komite Konsultatif


Andin Hadiyanto

LAPORAN

KETUA KOMITE KERJA

Sejak ditetapkan pertama kali pada tahun 2004 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, KSAP telah menyelesaikan penyusunan dua Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP Basis Kas menuju AkruaI dan SAP Basis AkruaI), 24 Buletin Teknis (Bultek), dan 4 Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP). Dalam menyiapkan, merumuskan, dan menyusun RPP SAP, KSAP mengikuti proses baku penyiapan standar (*due process*) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (*best practices*).



Sepanjang tahun 2019, KSAP telah melakukan berbagai kegiatan penyusunan standar dan implementasinya antara lain melaksanakan empat kali kegiatan dengar pendapat (*public/limited hearing*) atas draf PSAP Konsesi Jasa, draf PSAP Agrikultur, draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Pertukaran, draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dan draf PSAP Provisi. Untuk kegiatan implementasinya, KSAP telah melaksanakan kegiatan Workshop SAP Lingkup APIP yang diselenggarakan di Makassar.

Sejalan dengan kebutuhan standar akuntansi pemerintahan yang berkualitas, penyusunan standar akuntansi yang dilakukan KSAP merujuk pada standar akuntansi sektor publik internasional (*International Public Sector Accounting Standards*), serta standar akuntansi produk penyusun standar lain yang relevan.

Sejalan dengan visi dan misi KSAP yaitu mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, selama satu tahun terakhir, KSAP juga memberikan fasilitasi konsultasi

penerapan SAP kepada instansi pemerintah. Selama tahun 2019 KSAP telah mengeluarkan 19 surat jawaban konsultasi dan telah dibukukan menjadi Buku Bunga Rampai Sap Tahun 2019. Instansi yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Layanan Umum (BLU), tersebut sebagian besar berkonsultasi pada periode semester II tahun 2019 dengan topik Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Belanja, dan Akuntansi Badan Layanan Umum.

Dalam rangka publikasi standar, KSAP telah menerbitkan buku SAP 2019, Bultek serta Buku Bunga Rampai. Buku-buku publikasian tersebut didistribusikan kepada pengguna standar baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Buku publikasian tersebut juga dapat diakses melalui website KSAP (www.ksap.org).

Sebagai penutup, perlu kami sampaikan bahwa Laporan Tahunan KSAP ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan kegiatan KSAP selama Tahun 2019 kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini memuat, pelaksanaan kegiatan, dan capaian KSAP selama tahun 2019, serta rencana kegiatan tahun 2020.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite Konsultatif, Komite Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat KSAP yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya sehingga dalam setahun ini KSAP mampu menyelesaikan penyusunan beberapa standar sesuai target yang telah direncanakan.

Seperti pepatah yang menyebutkan tak ada gading yang tak retak, kami menyadari masih kekurangan dalam penyusunan standar oleh KSAP. Karena itu kepada seluruh pemangku kepentingan, kami harapkan saran dan masukan yang dapat kami gunakan dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan selanjutnya. Maka dari itu, atas kerja sama dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2020
Ketua Komite Kerja



Sumiyati 



DAFTAR ISI

i

Sambutan Ketua Komite Konsultatif

ii

Laporan Ketua Komite Kerja

1

Profil KSAP

5

Tugas Pokok KSAP

7

Rencana Strategis KSAP

12

Capaian KSAP Tahun 2019

23

Rencana Kerja KSAP Tahun 2020

26

Penutup

Lampiran : Dokumentasi Kegiatan Tahun 2019

DAFTAR TABEL

7

Tabel 1. Daftar Keputusan
Presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

13

Tabel 2. Daftar PSAP Lanjutan
Tahun 2018 dan Progress Penyusunan

14

Tabel 3. Daftar PSAP Tahun 2019
dan Progress Penyusunan

17

Tabel 4. Buku Bunga Rampai SAP
Semester I Tahun 2019

18

Tabel 5. Buku Bunga Rampai SAP
Semester II Tahun 2019

20

Tabel 6. Daftar Tamu KSAP
2019

22

Tabel 7. Rekapitulasi Kegiatan
KSAP Tahun 2019





PROFIL KSAP

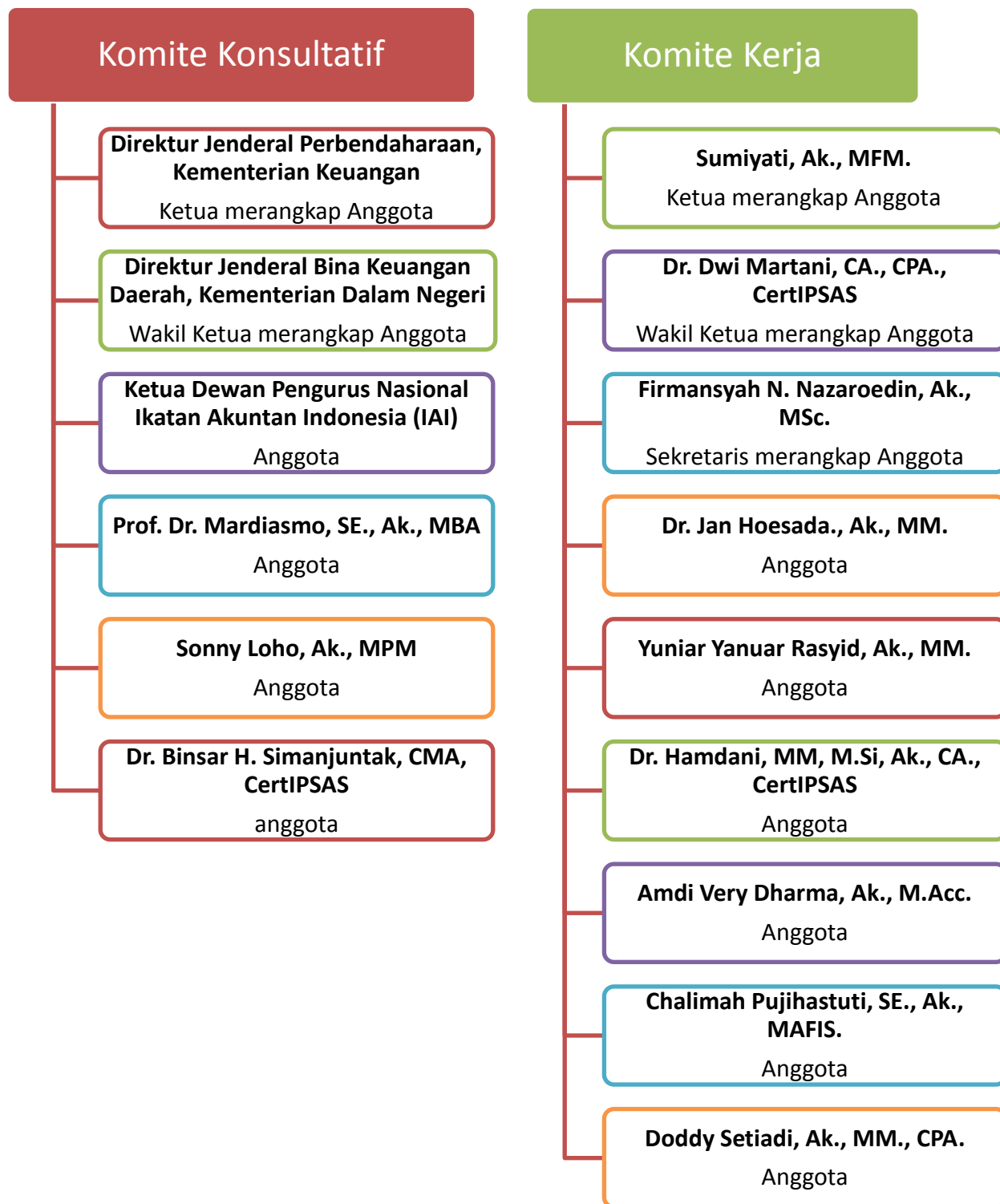
Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP disusun oleh Komite Independen yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres).

Pembentukan KSAP pertama kali dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 2017.

KSAP adalah komite yang independen. KSAP beranggotakan para profesional yang berasal dari lingkungan pemerintah, praktisi akuntansi pemerintahan, asosiasi profesi akuntan, dan akademisi yang kompeten di bidang akuntansi sektor publik/pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak terkait lainnya.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari Komite Konsultatif dan Komite Kerja. Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep RPP SAP. Komite Kerja bertugas menyusun konsep RPP Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Kerja berkonsultasi dan dapat meminta pendapat dari Komite Konsultatif.

Susunan Komite Konsultatif dan Komite Kerja KSAP sesuai Keppres Nomor 28 Tahun 2017 adalah:



Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas KSAP, Komite Kerja KSAP membentuk Kelompok Kerja yang tata kerja serta keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja.

Kelompok Kerja periode tahun 2019 dibentuk dengan KEP-04/K.1/KSAP/I

/2019 tanggal 28 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan KEP-06/K.1/KSAP/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang beranggotakan 30 orang dan berasal dari berbagai lembaga. Susunan keanggotaan kelompok kerja tersebut sebagai berikut:

1. **Mega Meilistya, SE.Ak., MBA.,** Ketua merangkap Anggota;
2. **Hamim Mustofa, Ak., CA.,** Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. **Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA,** Anggota;
4. **Yulia Candra Kusumarini, S.Sos, SE., MM.,** Anggota;
5. **Heru Novandi, SE, Ak., CA.,** Anggota;
6. **Muliani Sulya Fajarianti., SE., M.Ec.Dev., CA.,** Anggota;
7. **Zulfikar Aragani, SE. MM.,** Anggota;
8. **Mugiya Wardhani, SE, Ak., MM,** Anggota;
9. **Lucia Widiarsanti, SE, M.Si., CFE, CA., CertIPSAS,** Anggota;
10. **Dr. Mei Ling, SE, Ak., MBA, CA., CertIPSAS,** Anggota;
11. **Jamason Sinaga, Ak., SIP., CA.,** Anggota;
12. **Kadek Imam Eriksiawan M.Sc., Ak., M.Prof. Acc., BAP., CA., CertIPSAS,** Anggota;
13. **Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., CertIPSAS,** Anggota;
14. **Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., CertIPSAS,** Anggota;
15. **Dwinanto, SE.Ak.,** Anggota;
16. **Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., CA.,** Anggota;
17. **DR. Ratna Wardhani, SE., M.Si., Ak., CA., CGMA., CertIPSAS,** Anggota;
18. **Ananto Budiono, SE.,** Anggota;
19. **Rahadian Widagdo, SST., AK., M.Sc., CertIPSAS,** Anggota;
20. **Didiet Ary Setyanang, SST., AK., M.Prof. Acc,** Anggota;
21. **Joko Tri Prasetyo, SST., AK., M. Acctg.Fin,** Anggota;
22. **Jona Maria Matow, SIP., M.Ak.,** Anggota.
23. **Budiman, SST., SE., Ak., MBA.,** Anggota.
24. **Andy Prasetiawan Hamzah, SST., M.Si., Ak. CA.,** Anggota.
25. **Januarti Tiurmaida, SE., MM.,** Anggota.
26. **I Putu Sukma Hendrawan.,** Anggota.
27. **Kresia Ramadanty, SST., Ak., MBPM., CAPM, CPMA.,** Anggota.
28. **Dr. Sylvia Veronica N.P. Siregar, SE.Ak., CA.,** Anggota.
29. **Rahmat Mulyono, SE.Ak., M.Acc., CA.,** Anggota.

Sesuai dengan Keppres KSAP bahwa KSAP dapat dibantu oleh Sekretariat KSAP, yang susunan organisasi serta tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif.

Tahun 2019 Sekretariat KSAP ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 1/KM.5/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Susunan keanggotaan Sekretariat KSAP Tahun 2019

1. **Joni Afandi**, selaku Kepala Seksi Fasilitasi KSAP, Ketua merangkap Anggota;
2. **Zulfikar Aragani**, Anggota
3. **Harunsyah Hutagalung**, Anggota;
4. **Nia Esti Wulansari**, Anggota;
5. **Sri Ismiati**, Anggota;
6. **Ilham Akbar**, Anggota;
7. **Gahara Dijerja**, Anggota.

TUGAS POKOK

KSAP bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP). SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah

Pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Dalam menyiapkan, merumuskan, dan menyusun RPP SAP, Komite Kerja mengikuti proses baku penyiapan standar (*due process*) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (*best practices*).

Proses baku penyusunan standar meliputi tahapan sebagai berikut:

Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar



Tahap ini merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi dan pelaporan keuangan yang memerlukan pengaturan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP

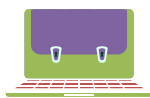


KSAP dapat membentuk pokja yang bertugas membahas topik-topik yang telah disetujui. Keanggotaan Pokja ini berasal dari berbagai instansi yang kompeten di bidangnya.

Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja



Untuk pembahasan suatu topik, Pokja melakukan riset terbatas terhadap literatur-literatur, standar akuntansi yang berlaku di berbagai negara, praktik-praktik akuntansi yang sehat (*best practices*), peraturan-peraturan, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.



Penulisan Draf SAP oleh Kelompok Kerja

Berdasarkan hasil riset terbatas dan acuan lainnya, Pokja menyusun draf SAP. Draf yang telah selesai disusun selanjutnya dibahas oleh Pokja.



Pembahasan Draf oleh Komite Kerja

Draf yang telah disusun oleh Kelompok Kerja dibahas oleh anggota Komite Kerja. Pembahasan diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar. Dengan pendekatan ini, diharapkan draf tersebut menjadi standar akuntansi yang berkualitas. Pembahasan ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan dari draf awal yang diusulkan oleh Pokja. Pada tahap ini, Komite Kerja juga melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyamakan persepsi.



Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan

Komite Kerja berkonsultasi dengan Komite Konsultatif untuk pengambilan keputusan peluncuran draf publikasi SAP.



Peluncuran Draf SAP (*Exposure Draft*)

KSAP melakukan peluncuran draf SAP dengan mengirimkan draf SAP kepada *stakeholders*, antara lain masyarakat, lembaga legislatif, lembaga pemeriksa, dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan.



Dengar Pendapat Publik Terbatas (*Limited Public Hearing*) dan Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*)

Dengar pendapat dapat dilakukan dalam dua tahap yaitu dengar pendapat publik terbatas dan dengar pendapat publik. Dengar pendapat publik terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan draf publikasi.

Dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminta tanggapan masyarakat terhadap draf SAP.



Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Draf SAP

KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang diperoleh dari dengar pendapat publik terbatas, dengar pendapat publik dan masukan lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draf SAP.



Finalisasi Standar

Dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP memperhatikan pertimbangan dari BPK. Di samping itu, tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi, maupun bahasa. Finalisasi setiap PSAP ditandai dengan penandatanganan draf PSAP oleh seluruh anggota KSAP.

RENCANA STRATEGIS



Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Untuk memenuhi amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004, dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017.



Tabel 1
Daftar Keputusan Presiden tentang KSAP

NO.	KEPPRES NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
1.	84 Tahun 2004	5 Oktober 2004	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
2.	2 Tahun 2005	4 Januari 2005	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
3.	3 Tahun 2009	2 Maret 2009	Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
4.	21 Tahun 2013	12 Juli 2013	Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
5.	30 Tahun 2016	5 September 2016	Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 84

			Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
6.	28 Tahun 2017	16 Oktober 2017	Perubahan kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

KSAP bertugas menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Dalam penyusunan SAP, KSAP menetapkan proses penyiapan standar dan meminta pertimbangan mengenai substansi standar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat (*due process*) agar dihasilkan standar yang objektif dan bermutu. Terhadap pertimbangan yang diterima dari BPK, KSAP memberikan tanggapan, penjelasan, dan/atau melakukan penyesuaian sebelum SAP ditetapkan menjadi peraturan pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan peralihan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual (*accrual basis accounting*) dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun setelah UU Nomor 17 Tahun 2003

ditetapkan atau pada tahun anggaran 2008. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas menuju akrual. Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan dalam rangka menuju penerapan *accrual basis accounting*, selanjutnya KSAP menyusun SAP berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 22 Oktober 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan secara implisit memberikan mandat kepada KSAP untuk mengembangkan SAP. Hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penjelasan pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perubahan" adalah penambahan, penghapusan, atau penggantian satu atau lebih PSAP.

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2017 juga secara implisit memberikan mandat kepada KSAP untuk menyusun Standar yang berlaku bagi pemerintah desa. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruh Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 - Dalam rangka mempersiapkan penyusunan konsep rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintahan desa, dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DESA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

DASAR HUKUM KSAP

KSAP memiliki visi sebagai berikut:

"Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas."

VISI & MISI KSAP

Misi utama KSAP adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Mendorong pihak-pihak yang berkepentingan mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan pemerintah.

Nilai Dasar



Independen

Anggota KSAP menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu demi kepentingan semua pihak.



Profesionalisme

Anggota KSAP membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kode etik yang berlaku.



Demokratis

Anggota KSAP menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dengan mengedepankan kemufakatan dalam pengambilan keputusan.



Universal

Anggota KSAP membangun Standar Akuntansi Pemerintahan bersikap objektif dengan mengedepankan universalitas agar dapat diterapkan semua entitas pelaporan dan diterima oleh para pemangku kepentingan.

Tujuan, Sasaran, dan Kegiatan Strategis

Tujuan Strategis:

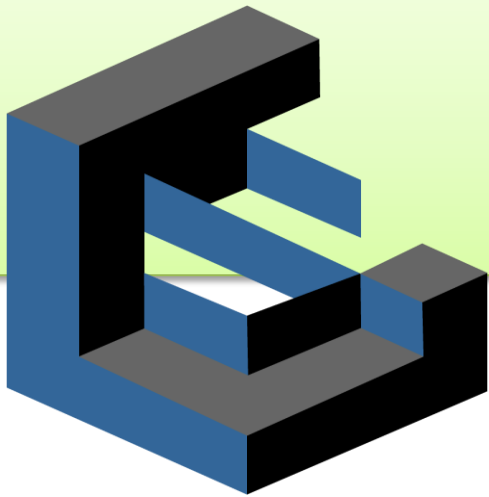
1. Menyusun standar akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik, dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.
2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat atas manfaat informasi laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan menjaga independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sasaran Strategis

1. Tersedianya Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia yang dapat diterapkan oleh entitas pelaporan dan memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
2. Tersedianya interpretasi dan buletin teknis standar akuntansi pemerintahan yang dibutuhkan para pemangku kepentingan.
3. Terbangunnya kesamaan visi untuk peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah dengan lembaga-lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan ketaatan entitas pelaporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan.
5. Meningkatkan Profesionalisme anggota KSAP.
6. Terbangunnya komunikasi dan koordinasi KSAP dengan para pemangku kepentingan.

Kegiatan Strategis

1. Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Penyusunan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Penyusunan Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.
5. Limited Hearing Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Public Hearing Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. Training of Trainers/ Workshop/ Sosialisasi awal PSAP dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Permintaan Pertimbangan PSAP ke Badan Pemeriksa Keuangan.
9. Pelayanan publik terkait akuntansi pemerintahan.
10. Pengembangan sumber daya manusia KSAP
11. Pemeliharaan website KSAP (www.ksap.org).
12. Penyelenggaraan helpdesk KSAP.
13. Komunikasi publik.
14. Audiensi dengan Komite Konsultatif dan/atau Menteri Keuangan.
15. Penyelenggaraan Kesekretariatan



CAPAIAN TAHUN '2019

Kegiatan penyusunan standar dan buletin teknis tahun anggaran 2019 meliputi:

1. PSAP tentang Pengaturan Konsesi Jasa yang telah selesai dan dalam proses otentifikasi.
2. Penyusunan 11 (sebelas) draf PSAP, yang terdiri dari:
 - a) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Pengaturan Bersama;
 - b) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Pendapatan dari Transaksi Pertukaran
 - c) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran
 - d) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Agrikultur
 - e) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Imbalan Kerja
 - f) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Instrumen Keuangan: Penyajian
 - g) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan & Pengukuran
 - h) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan
 - i) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Analisis Laporan Keuangan
 - j) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Penyajian Informasi Sektor Pemerintah Umum

- k) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi.
3. Penyusunan 2 (dua) draf Buletin Teknis Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari:
- a) Draf Buletin Teknis Akuntansi Dana Bergulir Akrual yang akan menggantikan Buletin Teknis Nomor 07 Akuntansi Dana Bergulir;
- b) Draf Buletin Teknis Akuntansi Badan Layanan Umum.
4. Penyusunan Bunga Rampai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan Draf Pernyataan Standar Akuntansi

Dalam tahun 2019, progress 7 (tujuh) buah *draft* PSAP yang merupakan kelanjutan dari penyusunan tahun 2019, yaitu sebagaimana terlihat pada Tabel 2 berikut ini.



Tabel 2.

Daftar PSAP Lanjutan Tahun 2018 dan Progress Penyusunan

No	PSAP	Keterangan per akhir Tahun 2019
1	PSAP Pengaturan Bersama	Proses di Tim Kecil
2	PSAP Akuntansi Kerja Sama Operasi	Proses Otentifikasi di Komite Kerja Perubahan judul menjadi PSAP Pengaturan Konsesi Jasa LH atas Draf PSAP Pengaturan Konsesi Jasa dilakukan pada T3, sedang Public Hearing dilaksanakan pada T4 Tahun 2019
3	PSAP Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan	BPK RI telah bersurat kepada Menteri Keuangan menyampaikan Pertimbangan BPK melalui surat Ketua BPK Nomor 114/S/I/7/2019 tanggal 2 Juli 2019. Terdapat pertimbangan substansi yaitu terkait dengan putusan pengadilan yang telah didiskusikan dengan BPK Proses berikutnya adalah Penetapan melalui Peraturan Menteri Keuangan yang direncanakan mulai pembahasan di awal tahun 2020
4	PSAP Sewa	Proses telah dimintakan Pertimbangan ke BPK RI melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-390/MK.05/2019 tanggal 15 Mei 2019

		Sampai dengan akhir Tahun 2019 pertimbangan masih belum diperoleh
5	PSAP Kebijakan Akuntansi (Revisi PSAP 10)	Proses telah dimintakan Pertimbangan ke BPK RI melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-390/MK.05/2019 tanggal 15 Mei 2019 Sampai dengan akhir tahun 2019 pertimbangan masih belum diperoleh
6	PSAP ATB	Telah ditetapkan melalui PMK 90 Tahun 2019
7	PSAP Properti Investasi	Proses telah dimintakan Pertimbangan ke BPK RI melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-390/MK.05/2019 tanggal 15 Mei 2019 Sampai dengan akhir tahun 2019 pertimbangan masih belum diperoleh

Adapun penyusunan PSAP baru yang dimulai pada Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 3 berikut ini:



Tabel 3.

Daftar PSAP Tahun 2019 dan Progress Penyusunan

No	PSAP	Target 2019	Progress 2019
1	PSAP Pendapatan dari Transaksi Pertukaran	Kajian/draf awal	LH 5 Desember 2019
2	PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran	Kajian/draf awal	LH 5 Desember 2019
3	PSAP Aset Biologis	Draf final Perubahan judul PSAP Agrikultur	LH 15 Oktober 2019
4	PSAP Instrumen Keuangan: Penyajian	Draf awal	Proses Peyusunan Draf PSAP di Tim
5	PSAP Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran	Draf awal	Proses Peyusunan Draf PSAP di Tim
6	PSAP Instrumen Keuangan: Pengungkapan	Draf awal	Proses Peyusunan Draf PSAP di Tim
7	PSAP Analisis Laporan Keuangan	Kajian	Proses Peyusunan Draf PSAP di Tim
8	PSAP Penyajian Informasi Keuangan Pemerintah Umum	Kajian	Proses Peyusunan Draf PSAP di Tim

9	PSAP Imbalan Kerja	Kajian	Proses Peyusunan Draf PSAP di Tim
10	Penyelarasan PSAP	Draf	Menunggu Proses di Tim yang lain
11	PSAP Provisi, Kewajiban Kontinjensi & Aset Kontinjensi	Draf Awal	Proses Peyusunan di Tim

Adapun PSAP Aset Tak Berwujud telah ditetapkan dengan PMK Nomor 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 14 Tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud tanggal 18 Juni 2019.

Sementara itu, draf Standar Akuntansi Pemerintahan Desa telah mendapat pertimbangan dari BPK berdasarkan surat Ketua BPK Nomor 19/S/I-XII/3/2017 tanggal 27 Maret 2017, saat ini masih proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana surat Menteri Keuangan

kepada Menteri Hukum dan HAM nomor S-833/MK.05/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Desa. Proses penetapan SAPDesa cukup terkendala dikarenakan adanya hal yang perlu dikomunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan rapat harmonisasi di Kemenkumham, Kemenkumham meminta kepada Kemenko Perekonomian untuk mengawal harmonisasi substansi tingkat kementerian, sampai dengan berakhirnya tahun 2019 high level meeting tersebut belum terlaksana.

Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Akuntansi Pemerintahan

Dalam tahun 2019, KSAP melakukan proses penyusunan 2 (dua) buah buletin teknis akuntansi pemerintahan yaitu:

- a) Buletin Teknis SAP tentang Akuntansi Dana Bergulir – AkruaI
- b) Buletin Teknis SAP tentang Akuntansi Badan Layanan Umum

Sosialisasi, Public Hearing dan Limited Hearing SAP Berbasis AkruaI dan Buletin Teknis Baru SAP Berbasis AkruaI

Sebagai bagian dari *due process* penyusunan standar, pada tahun 2019, KSAP melaksanakan *Limited Hearing* dan *Public Hearing* atas *draft* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

Limited Hearing:

- a) **Pengaturan Konsesi Jasa** Tanggal 4 September 2019 di Jakarta,
- b) **PSAP Pendapatan dari Transaksi Pertukaran** tanggal 5 Desember 2020 di Jakarta,
- c) **PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran** tanggal 5 Desember 2020 di Jakarta
- d) **PSAP Provisi, Kewajiban Kontinjensi & Aset Kontinjensi** tanggal 5 Desember 2020 di Jakarta.

Public Hearing PSAP Pengaturan Konsesi Jasa Pada Tanggal 7 November 2019 di Jakarta

Workshop SAP dilaksanakan di Makassar tanggal 20 November 2019. Workshop ini dikhususkan untuk APIP dengan materi seluruh PSAP dengan pendekatan diskusi dan *problem solving*

Sosialisasi di Bali tanggal 18 Oktober 2019 dengan materi:

- a) Akuntansi Piutang
- b) Akuntansi Pendapatan
- c) Akuntansi BLU/BLUD
- d) Akuntansi Aset Tetap
- e) Akuntansi Persediaan

Pengembangan Sumber Daya Manusia KSAP

Dalam rangka peningkatan kapasitas, anggota KSAP juga mengikuti seminar/kongres/ konferensi. Kegiatan seminar yang diikuti oleh KSAP tersebut Yaitu :

1. Rapat tahunan Anggota Komite Konsultatif IPSASB (CAG IPSASB) di Toronto, tanggal 16 sampai dengan 22 Juni 2019 : Sekretaris KSAP, Firmansyah N. Nazaroedin dan Ketua Pokja, Mega Meilistya beserta Joni Afandi selaku anggota pokja

2. Rapat tahunan Anggota Komite Konsultatif IPSASB (CAG IPSASB) di Abu Dhabi, tanggal 9 sd 13 Desember 2019 : Sekretaris KSAP, Firmansyah N. Nazaroedin dan Joko Tri Prasetyo beserta Joni Afandi selaku anggota pokja.

Pemeliharaan Website KSAP

Dalam rangka memberikan informasi kepada publik mengenai organisasi KSAP dan produk standar akuntansi yang dihasilkan, KSAP telah memiliki website dengan alamat <http://www.ksap.org>.

Website KSAP dikelola oleh Sekretariat KSAP sejak Juli 2004.

Pengembangan website ditujukan untuk memublikasikan seluruh produk yang dihasilkan KSAP, artiket, kegiatan KSAP, serta berbagai informasi penting lainnya. Pada Tahun 2019, telah dilakukan penyempurnaan konten website KSAP tersebut, dimulai dengan *update* profil KSAP, dan *update* produk KSAP yang meliputi Bultek, Bunga Rampai, serta Laporan Tahunan KSAP.

Pemeliharaan Helpdesk KSAP



Tabel 4

Buku Bunga Rampai SAP Semester I Tahun 2019

No.	Nomor Surat	Instansi	Perihal
1	S-18/K.1/KSAP/II/2019	Kementerian Keuangan	Akuntansi Aset Tetap : Revaluasi Aset Kemitraan
2	S-20/K.1/KSAP/II/2019	Kabupaten Solok Selatan	Akuntansi Penghapusan KDP
3	S-26/K.1/KSAP/III/2019	Kementerian Komunikasi dan Informasi	Akuntansi KPBU
4	S-27/K.1/KSAP/III/2019	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Akuntansi Pengakuan Aset dan Kewajiban
5	S-28/K.1/KSAP/III/2019	RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung	Akuntansi Pendapatan BLUD
6	S-29/K.1/KSAP/III/2019	Kementerian Sosial	Akuntansi Belanja Bantuan Sosial
7	S-44/K.1/KSAP/V/2019	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Akuntansi ATB
8	S-45/K.1/KSAP/V/2019	Kabupaten Pasuruan	Akuntansi Penghapusan Piutang
9	S-46/K.1/KSAP/V/2019	Kabupaten Buleleng	Akuntansi Perubahan Kebijakan Penyusutan

Selain menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), KSAP juga menerima pertanyaan atas permasalahan yang dihadapi oleh pengguna standar. Terhadap pertanyaan tersebut, selanjutnya KSAP memberikan solusi atas permasalahan yang disampaikan. Berbagai

pertanyaan dan jawaban tersebut, selanjutnya dikodifikasi ke dalam Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan yang berisi pertanyaan/permasalahan serta jawaban/pemecahan yang terkait dengan implementasi SAP.

Selama tahun 2019, KSAP telah menjawab 19 (sembilan belas) pertanyaan dari para pemangku kepentingan yang terkompilasi dalam:

- a. Buku Bunga Rampai SAP Semester I yang berisikan 9 Pertanyaan dan Jawaban KSAP; dan
- b. Buku Bunga Rampai SAP Semester II yang berisikan 10 Pertanyaan dan Jawaban KSAP.



Tabel 5
Buku Bunga Rampai SAP Semester II Tahun 2018

No.	Nomor Surat	Instansi	Perihal
10	S-63/K.1/KSAP/VII/2019	Kabupaten Solok Selatan	Akuntansi Piutang Dana Bergulir
11	S-64/K.1/KSAP/VII/2019	Provinsi DKI Jakarta	Akuntansi Pengembalian Kelebihan Pajak
12	S-65/K.1/KSAP/VII/2019	Rumah Sakit Umum Daerah	Pengelolaan Anjak Piutang
13	S-81/K.1/KSAP/VIII/2019	Kementerian Pertahanan	Metode Penilaian Persediaan
14	S-93/K.1/KSAP/X/2019	Kabupaten Kuantan Singingi	Akuntansi Investasi
15	S-101/K.1/KSAP/XI/2019	Kabupaten Pasuruan	Akuntansi Dana BOS
16	S-107/K.1/KSAP/XI/2019	Kabupaten Tulungagung	Akuntansi Utang Jangka Pendek
17	S-108/K.1/KSAP/XI/2019	Kabupaten Barito Kuala	Akuntansi Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap
18	S-109/K.1/KSAP/XI/2019	Kabupaten Tasikmalaya	Akuntansi Investasi Jangka Panjang Permanen
19	S-110/K.1/KSAP/XI/2019	Provinsi Gorontalo	Akuntansi Hibah dan Akuntansi Aset Tetap

Layanan Publik

Pada tahun 2019, KSAP juga memberikan layanan untuk menjadi narasumber SAP yang berasal dari permintaan berbagai instansi antara lain dari instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya, yaitu:



1. Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 di Jakarta pada tanggal 12 September 2019, diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.

2. Rapat Pendampingan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual tanggal 28 Januari 2019 diselenggarakan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah

3. Rapat Pendampingan Penggunaan/Pengelolaan DAK pada APBD tanggal 12 Maret 2019 diselenggarakan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah

4. Rapat Penatausahaan dan Pengelolaan BMN di Lingkup Kementerian Perhubungan tanggal 23 Juli 2019 diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

5. Workshop Kerugian Negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta

6. FGD Akuntansi Agrikultur diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 31 Oktober 2019 di Jakarta

7. Rapat Korodinasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang diselenggarakan oleh Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara tanggal 27 Agustus 2019 di Manado

Komunikasi Publik

Sepanjang tahun 2019, KSAP menerima tamu dari beberapa *stakeholders* Pemerintah Pusat, maupun pemerintah daerah yang

mengkonsultasikan beberapa permasalahan terkait penerapan standar. Di antaranya adalah:



Tabel 6.
Daftar Tamu KSAP 2019

NO.	INSTANSI	TEMA KONSULTASI
1.	Kab. Musi Rawas Utara, Prov. Sumsel	Konsultasi terkait kebijakan akuntansi dan pelaporan pemerintah daerah
2.	Kab. Solok Selatan	Konsultasi terkait penghentian KDP secara permanen
3.	Kab. Banjar	Konsultasi masalah dana BOS
4.	Kota Bandung	Konsultasi
5.	Prov. Sulawesi Barat	Konsultasi masalah utang
6.	RSUD dr Iskak Tulungagung	Konsultasi masalah konsinyasi (temuan BPK)
7.	BPKAD Taraha	Konsultasi masalah utang
8.	Kab. Tanah Laut	Konsultasi mengenai dana block grant
9.	Kab. Pasuruan	Konsultasi
10.	Kota Solok	Konsultasi mengenai kebijakan akuntansi dana bergulir
11.	Kab. Balangan	Konsultasi terkait kebijakan akuntansi persediaan
12.	Kab. Solok Selatan	Konsultasi
13.	kab. Bangka Tengah	Konsultasi
14.	Kota Pangkalpinang	Konsultasi
15.	Kabupaten Kepahiang	Konsultasi masalah pengakuan ATR, Persediaan, SOP SP38
16.	Kab. Lombok Barat	Konsultasi terkait kasda
17.	Kab. Banjar	Konsultasi terkait BOS
18.	Kab. Gorontalo	Konsultasi terkait penghapusan piutang daerah
19.	Kota Makassar	Konsultasi terkait penghapusan piutang daerah
20.	Kab. Dharmasraya Sumatera Barat	Konsultasi terkait penghapusan piutang daerah PBB, Dana bergulir

NO.	INSTANSI	TEMA KONSULTASI
21.	Kanwil DJPb Sumatera Selatan	Konsultasi PP 12/2019
22.	Kab. Banggai Laut Sulawesi Tengah	Konsultasi TKDI ttg SAP
23.	Kab. Bangka Tengah	Konsultasi terkait tentang aset biologis
24.	Kab. Tangerang	Konsultasi Lap. Keuangan BLUD
25.	Kot Gorontalo	Konsultasi kebijakan akuntansi
26.	Kab. Pasuruan	Konsultasi pencatatan BOS & BLU
27.	Kab Purworejo	Konsultasi aset tetap
28.	Kab Purworejo	Konsultasi BLUD
29.	Kot Banda Aceh/ RSUD Meuraksa Kota Banda Aceh	Konsultasi terkait dengan dana talang (SLT) klaim BPJS Kesehatan
30.	Kab. Tasikmalaya	Konsultasi hanya dan konsultasi pencatatan jangka permanen
31.	RSUD dr Iskak Tulungagung	Konsultasi piutang BLUD
32.	Kab. Banyuasin	Pengakuan akt kerja sama/ piutang di BLUD dan aset tidak berwujud
33.	Kabupaten Parigi Moutong	Konsultasi terkait pelaporan atas perubahan kode rekening barang (BMD)
34.	Aceh	Konsultasi ke KSAP terkait ATB
35.	Kab. SBD NTT	Konsultasi terkait penghapusan piutang
36.	Kabupaten Gorontalo RSUD Dunda Limboto (Dewah)	Konsultasi pinjaman SC F RS Dunda
37.	Asisten II Kabupaten Bangka Tengah	Konsultasi tentang pernyataan modal PTBTP
38.	Kabupaten Tasikmalaya	Konsultasi terkait temuan BPK tentang perubahan kebijakan akuntansi
39.	RSUD SMC Kab. Tasikmalaya	Konsultasi laporan keuangan BLUD
40.	Kabupaten Bulungan	Konsultasi terkait permendagri 108 tahun 2016

Lain-Lain (Penyelenggaraan Kesekretariatan)

Sepanjang tahun 2019, Sekretariat KSAP telah memfasilitasi pelaksanaan rapat sebanyak 95 kali rapat dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 7
Rekapitulasi Kegiatan KSAP Tahun 2019

RAPAT KSAP	FREKUENSI
Rapat Pleno	42 Kegiatan
Rapat Pleno Komsul	2 Kegiatan
Public/Limited Hearing	4 Kegiatan
FGD/Rapat Tim	48 Kegiatan
Workshop/TOT	1 Kegiatan
Sosialisasi SAP	1 Kegiatan
Total	98 Kegiatan

Lain-lain

Tahun 2019, KSAP melakukan pencetakan produk-produk KSAP yang disebarluaskan kepada para stakeholder yaitu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah. Atas hal dukungan keuangan, tingkat realisasi anggaran Fasilitas KSAP mencapai realisasi sebesar Rp.5.002.237.409,- yaitu 98.32% dari pagu sebesar Rp.5.087.641.000,-.





RENCANA KERJA '2020

A. Penyusunan PSAP

Sesuai dengan proses baku penyusunan SAP (*due process*), draf standar yang telah selesai disusun oleh KSAP selanjutnya dimintakan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan pertimbangan dari BPK, selanjutnya KSAP akan melakukan finalisasi atas draf standar dan selanjutnya melaporkan penyelesaian draf standar tersebut kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapannya.

B. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

Pada tahun 2020, KSAP akan melanjutkan penyelesaian buletin teknis SAP yang telah berjalan. Buletin teknis SAP yang akan dilanjutkan pembahasannya di tahun 2020 adalah:

- 1 Buletin Teknis tentang Akuntansi Dana Bergulir-Akrual, dan
- 2 Buletin Teknis tentang Akuntansi Badan Layanan Umum.

Pada tahun 2020, tidak menutup kemungkinan KSAP menyusun buletin teknis

Pada tahun 2020, KSAP akan melanjutkan penyusunan draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang terdiri dari:

1. PSAP Pengaturan Bersama
2. PSAP Pendapatan dari Transaksi Pertukaran
3. PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran
4. PSAP Agrikultur
5. PSAP Instrumen Keuangan: Penyajian
6. PSAP Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
7. PSAP Instrumen Keuangan: Pengungkapan
8. PSAP Analisis Laporan Keuangan
9. PSAP Penyajian Informasi Keuangan Pemerintah Umum
10. PSAP Imbalan Kerja
11. PSAP Provisi, Kewajiban Kontinjensi & Aset Kontinjensi
12. Penyelarasan PSAP

Disamping itu KSAP akan menyusun beberapa PSAP baru yaitu:

1. PSAP Forex
2. PSAP Borrowing Cost

baru, di luar daftar di atas, yang dibutuhkan dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual.

C. Public Hearing dan Limited Public Hearing SAP Berbasis Akrual dan Buletin Teknis Baru SAP Berbasis Akrual

Sesuai proses baku penyusunan standar (*due process*), *limited public hearing* dan *public hearing* diperlukan dalam rangka dengar pendapat publik guna memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan draft SAP dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP.

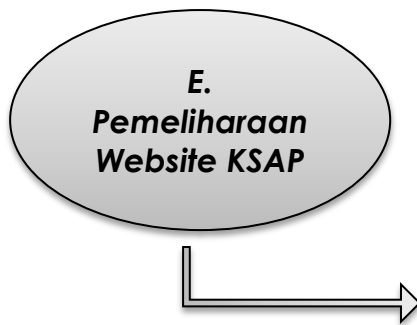
Pada tahun 2020 ini, KSAP merencanakan pelaksanaan *hearing* sebagai berikut.

1. PSAP Pengaturan Bersama (**Public Hearing**)
2. PSAP Pendapatan dari Transaksi Pertukaran (**Public Hearing**)
3. PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran (**Public Hearing**)
4. PSAP Agrikultur (**Public Hearing**)
5. PSAP Provisi, Kewajiban Kontinjensi & Aset Kontinjensi (**Public Hearing**)
6. PSAP Instrumen Keuangan: Penyajian (**Limited Hearing**)
7. PSAP Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (**Limited Hearing**)
8. PSAP Instrumen Keuangan: Pengungkapan (**Limited Hearing**)
9. PSAP Analisis Laporan Keuangan (**Limited Hearing**)
10. PSAP Penyajian Informasi Keuangan Pemerintah Umum (**Limited Hearing**)
11. PSAP Imbalan Kerja (**Limited Hearing**)

D. Pengembangan SDM KSAP

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP Berbasis Akrual, diperlukan peningkatan kapasitas bagi anggota KSAP. Peningkatan kapasitas diantaranya dilakukan dengan

peningkatan kajian standar dan praktik akuntansi baik internasional maupun nasional, serta keikutsertaan anggota KSAP pada seminar/kongres/konferensi akuntansi baik di dalam maupun di luar negeri.



Sejak tahun 2004, KSAP telah membuat website KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai organisasi, kegiatan dan output KSAP. Website tersebut senantiasa dilakukan pemeliharaan agar tetap dapat mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan kegiatan KSAP kepada publik. Pengunjung website dapat *men-download* dan mengajukan pertanyaan melalui email KSAP yang tersedia dalam situs www.ksap.org.

Disamping menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan, KSAP juga melayani konsultasi terkait dengan pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan. Atas berbagai pertanyaan dan jawaban tersebut, selanjutnya dikodifikasikan dalam suatu buku Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan yang memuat pertanyaan/permasalahan dan jawaban/ pemecahan permasalahan seputar implementasi SAP.



Kegiatan sosialisasi dan layanan publik terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan dalam bentuk pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pengguna SAP serta mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan.

Audiensi dengan komite Konsultatif dan/atau dengan Menteri Keuangan merupakan salah satu sarana perwujudan pertanggungjawaban kegiatan KSAP kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.



Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan untuk memberikan dukungan terhadap kinerja KSAP di tahun 2020

P.E.N.U.T.U.P.



Laporan Tahunan 2019 ini merupakan laporan pertanggungjawaban KSAP. Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi KSAP dan pihak-pihak yang berkepentingan. Masukan dari berbagai pihak baik yang terkait dengan substansi standar, interpretasi standar, buletin teknis, bantuan implementasi, program sosialisasi dan hal-hal lainnya dapat diberikan kepada KSAP agar di masa mendatang KSAP dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan dan menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan serta dapat memberikan dukungan teknis implementasi untuk mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

...

DOKUMENTASI TAHUN 2019



Rapat Pembahasan SAP

Jakarta, 1 Januari – 31 Desember 2019



Rapat Perdana KSAP, 9 Januari 2019



Rapat KSAP, 6 Februari 2019

Tim PSAP Agrikultur, 28 November 2019



Tim PSAP Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi.
28 November 2019



Tim PSAP Pendapatan dari Transaksi Non
Pertukaran
28 November 2019



Rapat Di Penghujung 2019. KSAP
11 Desember 2019

DOKUMENTASI TAHUN 2019



Limited Hearing

Jakarta, 5 Desember 2019



DOKUMENTASI TAHUN 2019



Limited Hearing PSAP Pengaturan Koneksi Jasa

Jakarta, 3 September 2019



DOKUMENTASI TAHUN 2019



Workshop Lingkup APIP
Makassar, 20-22 November 2019



DOKUMENTASI TAHUN 2019



Penyusunan PSAP



FGD PSAP Pengatusan Konsesi Jasa, 15 April 2019



Pembahasan Pertimbangan BPK
4 September 2019

DOKUMENTASI TAHUN 2019



Rapat Pleno Komite Konsultatif



Ruang Piet Hardjono, Jakarta,
2 Desember 2019



Ruang Jusuf Anwar, Jakarta,
6 Agustus 2019

DOKUMENTASI TAHUN 2019



Layanan Publik
Konsultasi / Terima Tamu



Pemkab Tambolaka
27 November 2019



Pemkab Gorontalo
27 November 2019



Pemkab Parigi Moutong
13 November 2019

DOKUMENTASI TAHUN 2019



Kegiatan Lainnya

Pleno KSAP Tahun 2019



**Diskusi Santai Dengan BPKP
"Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa"
19 Februari 2019**



**FGD Akuntansi Persediaan di KKP
8 April 2019**





Sekretariat :
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon: +62 21 3449230 Ext. 5311
<http://www.ksap.org>
e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com

